

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SERUI TRIWULAN I PERIODE JANUARI SAMPAI MARET 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SERUI
TRIWULAN I**

PERIODE JANUARI - MARET 2022

**Berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
1365/DJU/HM.02.3/5/2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY
PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) PADA DIREKTORAT JENDERAL
BADAN**

PERADILAN UMUM DAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Disahkan di Serui

Mengetahui ,

Ketua Pengadilan Negeri Serui.,



RONALD MASSANG, SH, MH
NIP. 19780403200212 1002

Ketua Tim Survei,

BUDDI,SH.
NIP. 197408021997031002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Pengadilan Negeri Serui Kls II akan terus berupaya meningkatkan integritas , performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan . Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di Pengadilan , salah satunya adalah upaya mewujudkan Zona Integritas pada seluruh pengadilan .

Otcome dari pembangunan zona integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM disatuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Khususnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya . Pedoman ini bersifat dinamis , dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM , yang mengarah kepada terwujudnya Zero Tolerance Approach (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi.

Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung R.I dalam mewujudkan Badan Peradilan yang agung membutuhkan integritas , kerja keras , komitmen , keyakinan dan kerjasama kita semua.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini masih perlu perbaikan kedepan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan singkat ini , berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Serui dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Serui.

Serui., 31 Maret 2022

Ketua Tim Survei

BUDDI,SH

NIP. 19740802199703 1002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui	
BAB IV	18
PENUTUP	18

4.1. Kesimpulan 18

4.2. Rekomendasi 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Serui berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- H.) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman pelaksanaan survey dan tata cara penggunaan survey dan tata cara penggunaan aplikasi survey pelayanan elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya .

.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Survei dilakukan oleh penyelenggara pelayanan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER

- Penyiapan Bahan

a. Kelengkapan peralatan elektronik

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

▪ Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi SISUPER.

▪ Pengisian Kuesioner oleh responden secara elektronik melalui aplikasi SISUPER yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Pengolahan data hasil survei melalui aplikasi .

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan secara periodek setiap 3 bulanan (triwulan) 4 kali dalam setahun dikarenakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman pelaksanaan survey dan tata cara penggunaan survey dan tata cara penggunaan aplikasi survey pelayanan elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya .

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik Pengambilan sampel dapat disesuaikan dengan jenis pelayanan, tujuan layanan dan data yang diinginkan diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan dimasing-masing unit layanan, untuk besaran sampel dan populasi menggunakan sampel dari Krejcie and Morgan.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serui

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil pengisian pengguna layanan/responden terhadap pertanyaan /kuisisioner yang telah ditentukan oleh pengawas (hakim Senior yang ditunjuk). Hakim senior yang ditunjuk akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, menjelaskan tata cara pengisian survei melalui aplikasi SISUPER, mengawasi petugas pelaksana bersifat objektif terhadap responden , mengarahkan responden untuk mengisi survei dilakukan dengan sendiri kecuali responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh petugas ,dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring /angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi biaya
5	Biaya tambahan
6	Hadiah

7	Transparansi biaya
8	Pencaloan
9	Perbuatan curang
10	Transaksi rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00-1,75	25-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2,50	43,76 -62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui mayoritas memiliki latar SLTA dan Sarjana (S1).

Tabel 3

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak sekolah	0	0,00
2	SD	2	3,38
3	SMP	9	15,25
4	SLTA	33	55,93
5	Diploma (D1,D2,D3)	0	0,00
6	S1	14	23,72
7	Pasca Sarjana S2/S3)	1	1,69
	Jumlah	59	100,00

Sumber data : Aplikasi SISUPER BADILUM

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 25,42 % responden pengguna layanan Pengadilan memiliki pekerjaan Wirasaha.

Tabel 4.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentasi
1	PNS	13	22,03
2	TNI	7	11,86
3	POLRI	2	3,38
4	SWASTA	9	15,25
5	WIRSAUSAHA	15	25,42
6	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7	LAINNYA	13	22,03
	Jumlahnya	59	100,00

Sumber data : Aplikasi SISUPER BADILUM

3.1.3 .Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei , diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin , yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebesar 76, 27 %

Tabel 5

NO	KLASIFISIKASI	FREKUENSI	PROSENTASI
1	Laki -Laki	45	76,27
2	Perempuan	14	23,72
	JUMLAH	59	100,00

Sumber data : Aplikasi SISUPER BADILUM

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 Tahun.

Tabel 6.

NO	KLASIFIKASI	FREKUENSI	PROSENTASI
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	7	11,86
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	24	40,68
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	21	35,59
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	6	10,17
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1	1,69
JUMLAH		59	100,00

Sumber data : Aplikasi SISUPER BADILUM

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

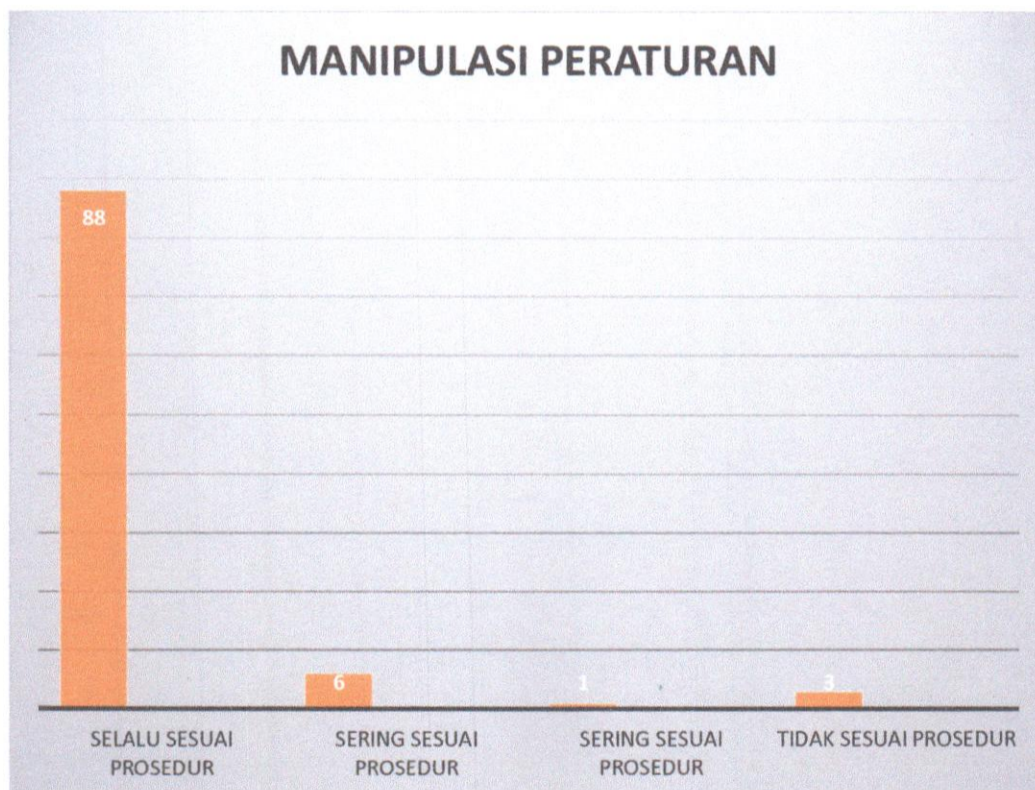
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,79

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 7.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	52	88,13
2	Sering Sesuai prosedur	3	4	6,77
3	Jarang Sesuai prosedur	2	1	1,69
4	Tidak Sesuai prosedur	1	2	3,38
Jumlah			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,96

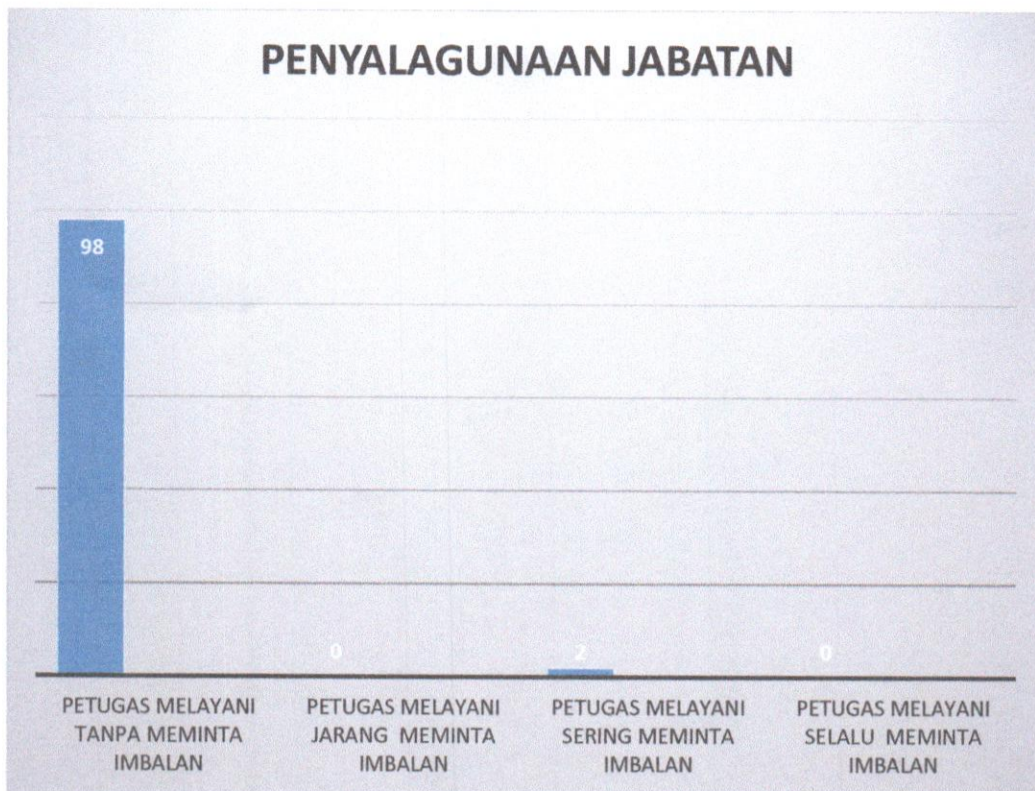
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	58	98,30
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0,00
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	1	1,69
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0,00
Jumlah			59	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.98

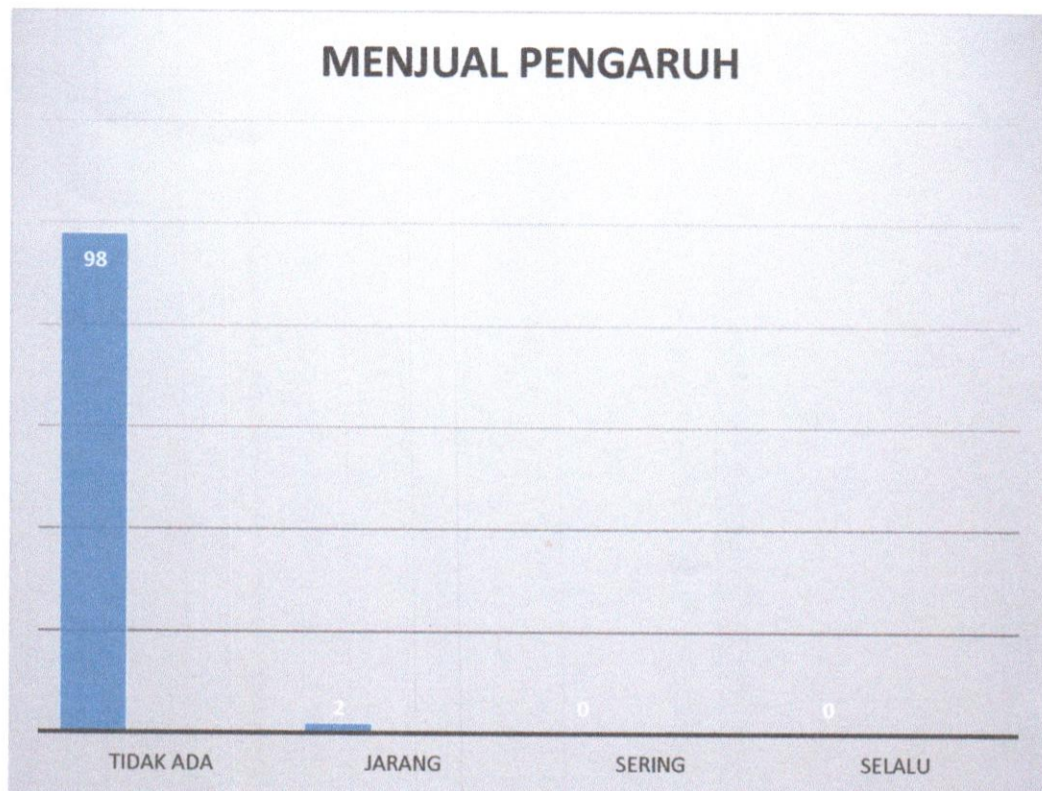
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dari tindakan Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak ada	4	58	98,30
2	Jarang	3	1	1,69
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
Jumlah			59	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

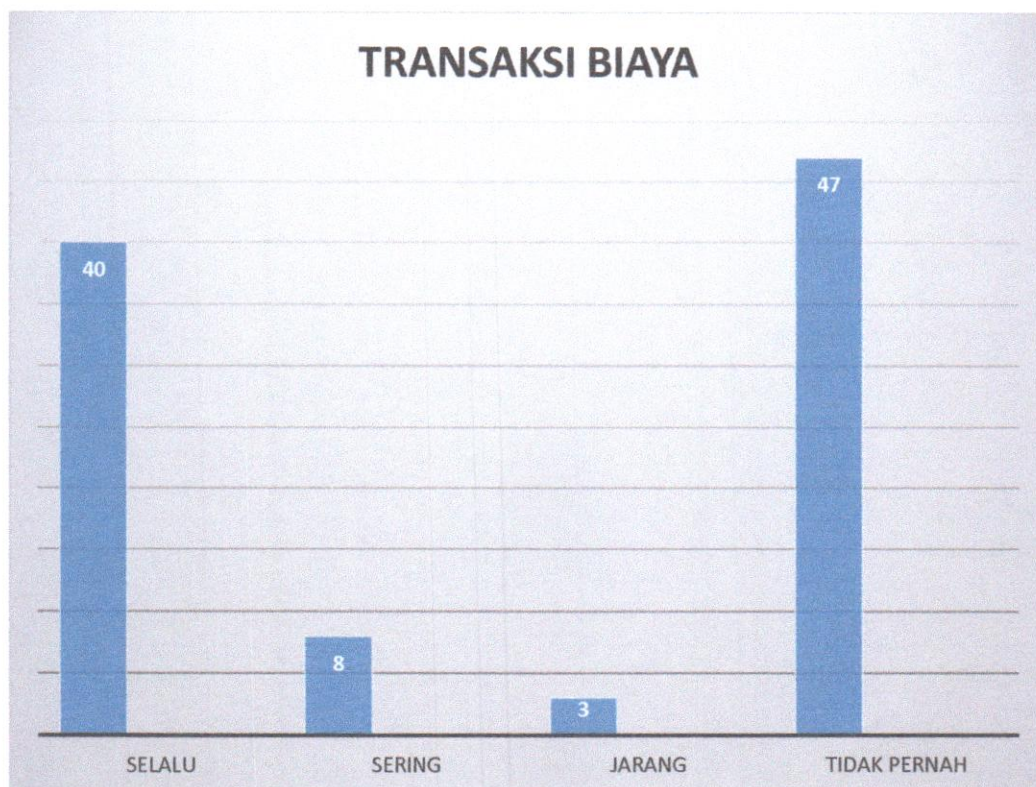
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 2,47

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui **kurang bersih** dalam tindakan transparansi biaya.

Tabel 10.
Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	24	40,67
2	Sering	3	5	8,47
3	Jarang	2	2	3,38
4	Tidak pernah	1	28	47,45
Jumlah			24	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.5. Indikator biaya tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada index 2,81

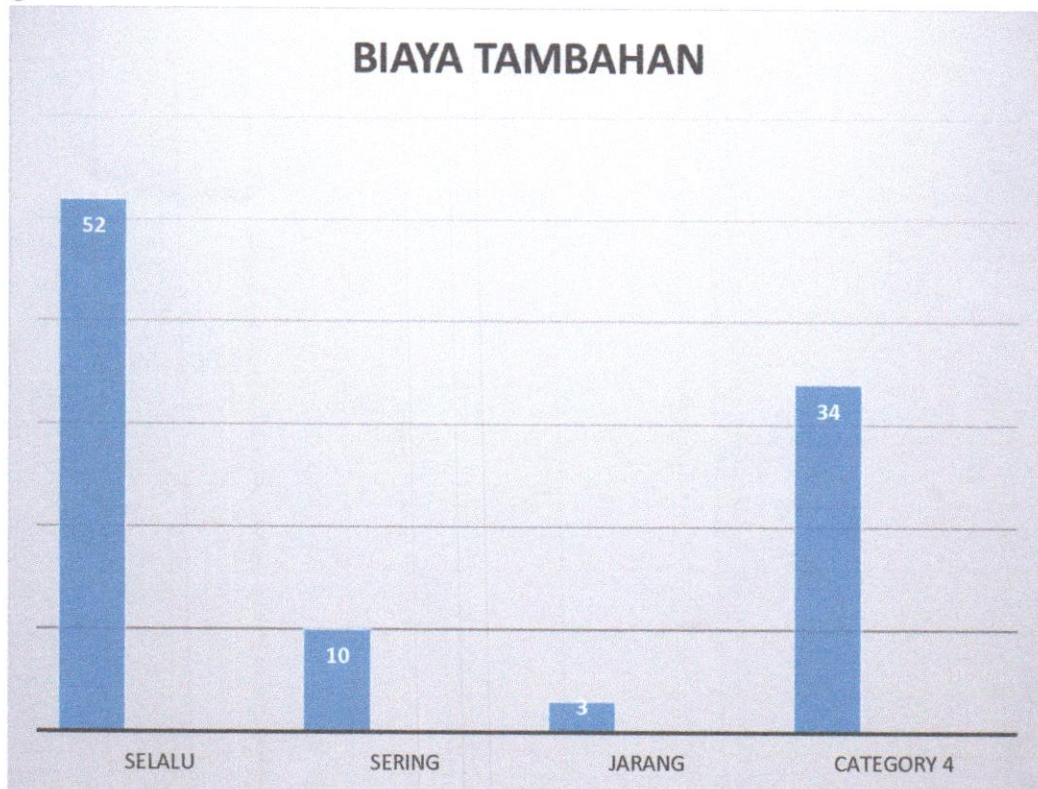
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui **Cukup bersih** dalam tindakan Transaksi rahasia.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	31	52,54
2	Sering	3	6	10,16
3	Jarang	2	2	3,38
4	Tidak pernah	1	20	33,89
Jumlah			24	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,83

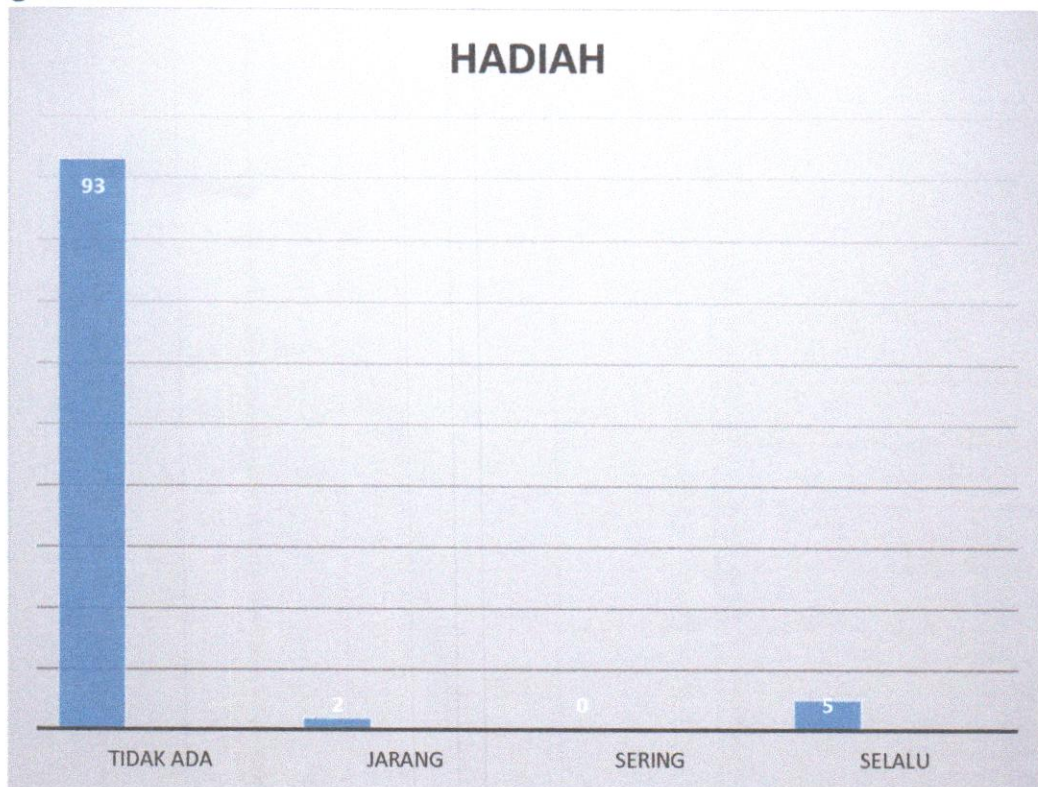
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dalam hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak ada	4	55	93,22
2	Jarang	3	1	1,69
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	3	5,08
Jumlah			59	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.2.7. Indikator transparansi biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator ransparansi biaya ini menunjukkan hasil pada index :3,03

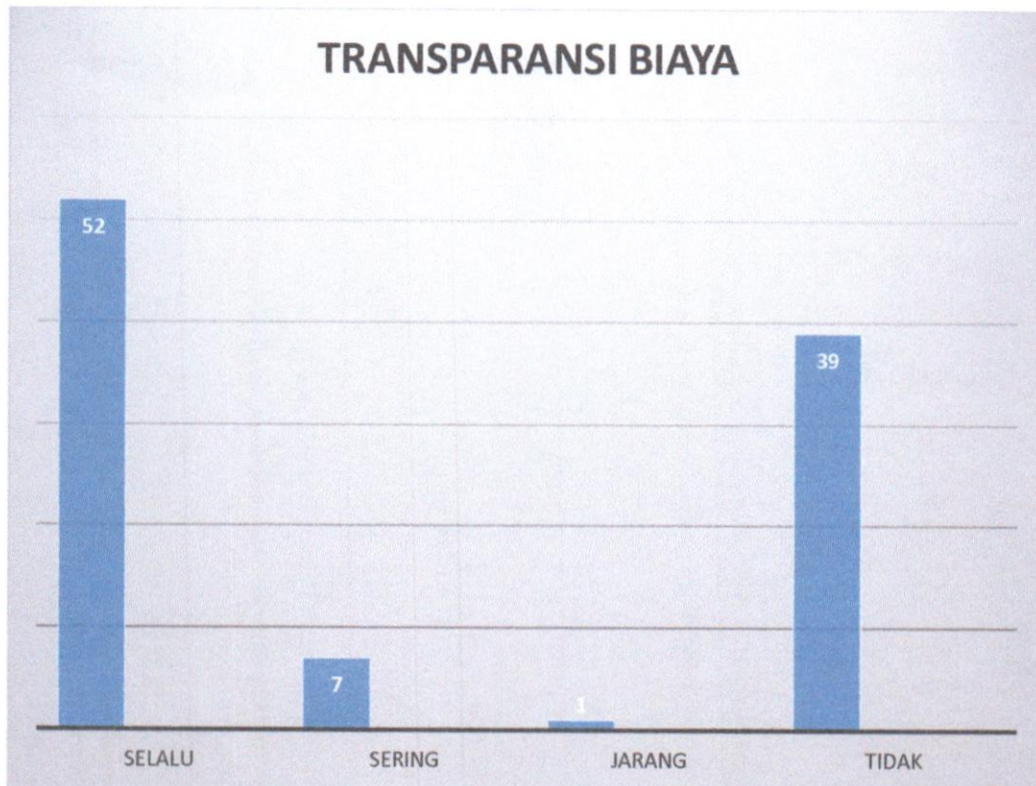
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Tarakan bersih dari transparansi biaya cukup bersih

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	31	52,54
2	Sering	3	4	6,77
3	Jarang	2	1	1,69
4	Tidak pernah	1	23	38,98
Jumlah			59	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,94

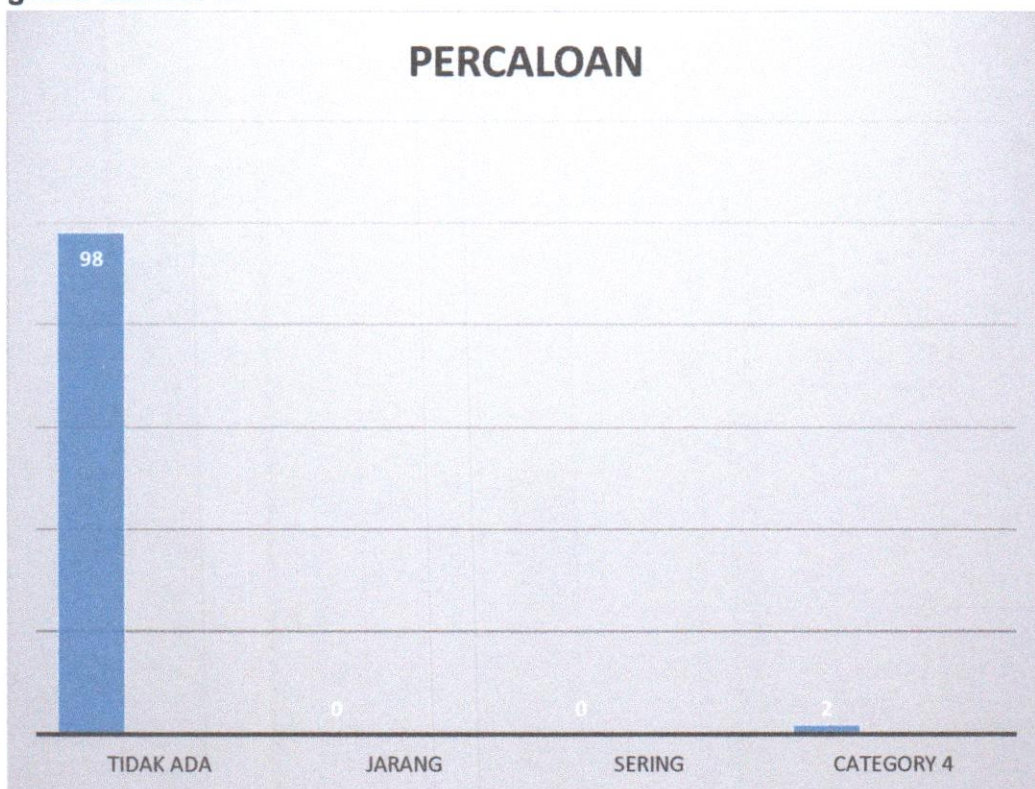
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dalam tindakan Percaloan .

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak ada	4	58	98,30
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	1	1,69
Jumlah			59	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index.4,00

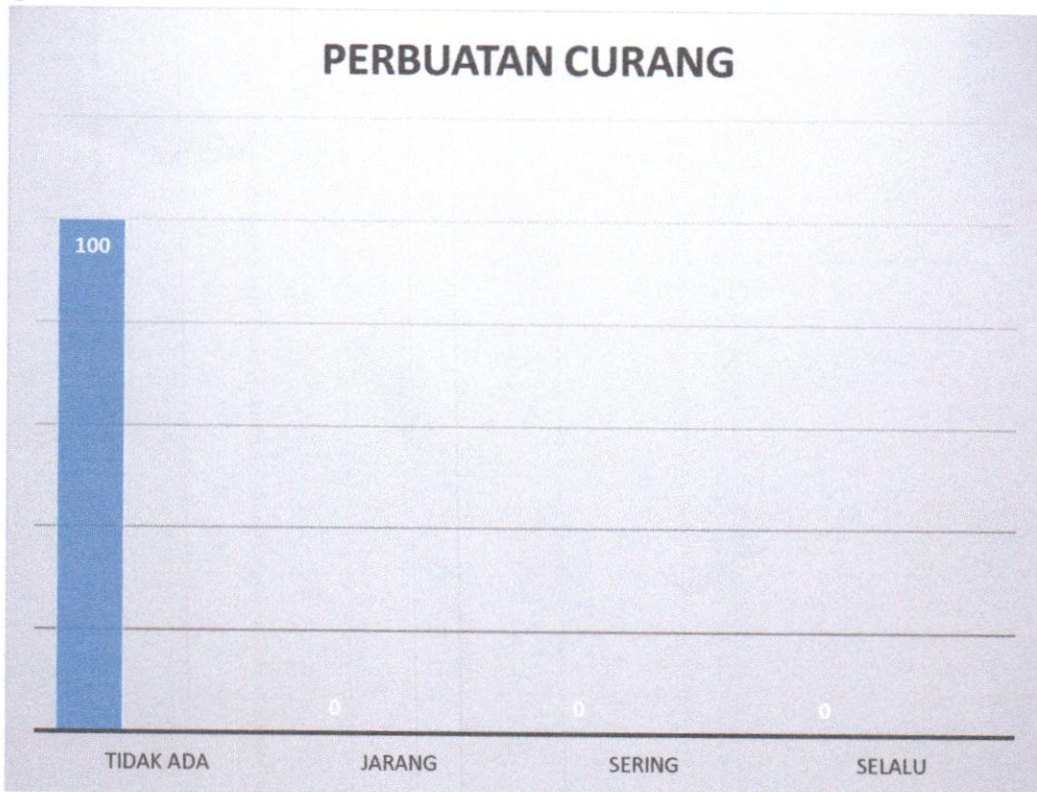
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih dari perbuatan curang .

Tabel 15.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak ada	4	59	100,00
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
Jumlah			24	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,98

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui bersih

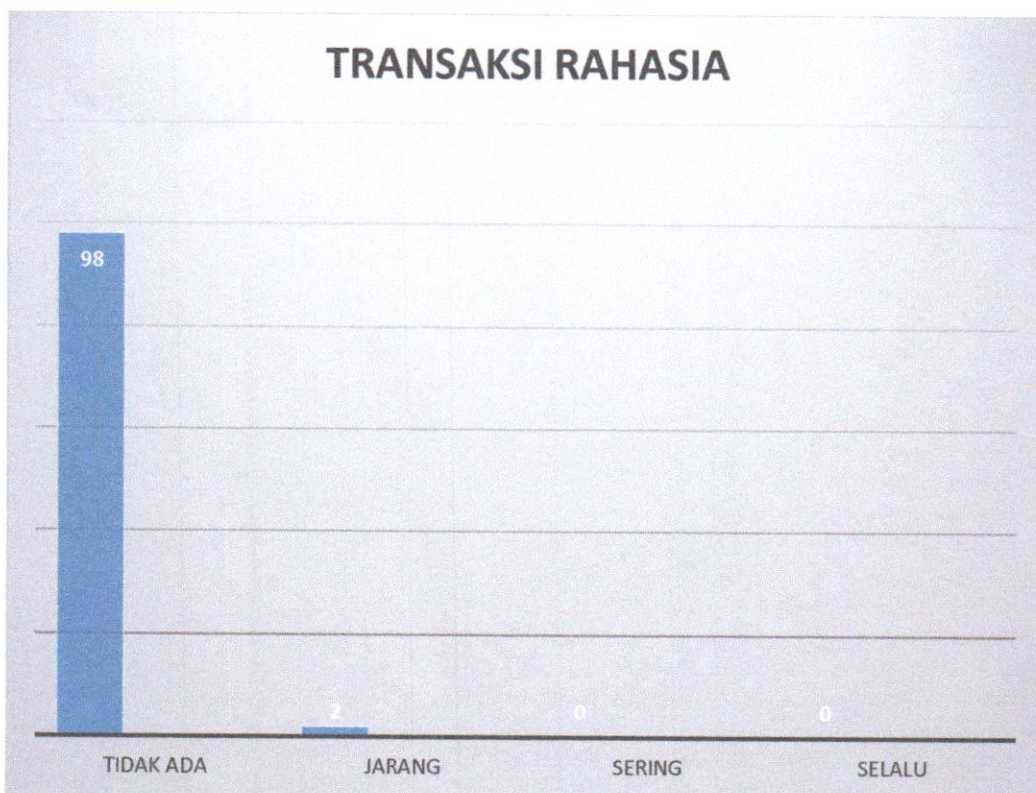
dalam transaksi rahasia

Tabel 16.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak ada	4	58	98,30
2	Jarang	3	1	1,69
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00,
Jumlah			24	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui sebesar 3.58 /89,58 %

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui

No	Unsur pertanyaan	Nilai rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	3,79
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
3	Menjual Pengaruh	3,98
4	Transaksi biaya	2,47
5	Biaya tambahan	2,81

6	Hadiah	3,83
7	Transparansi biaya	3,03
8	Pencaloan	3,94
9	Perbuatan curang	4,00
10	Transaksi rahasia	3,98

Indeks 3.58 tersebut jika dikonversikan dalam table persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Nilai BERSIH DARI KORUPSI . Nilai interval konversi indeks persepsi korupsi berada pada angka 4

Tabel 18.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Negeri Serui

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00-1,75	25-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-62,50	43,76 -62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4.00	81,26-100	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap pelayanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Serui

Selain memberikan output skor indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimasilir celah korupsi di satuan kerja pada pengadilan Negeri Serui.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan
1	Kami mohon pelayanan tugas sangat membantu kami dalam melakukan persuratan dikemudian hari, kami mengharapkan agar kedepan pelayanan ini berguna bagi masyarakat ditanah serui kabupaten Kepulauan Yapen
2	Sudah bagus , mohon ditingkatkan lagi pelayanannya
3	Pelayanan di Pengadilan Negeri Serui sudah sangat baik, cepat dan transparansi , yang perlu ditingkatkan adalah motifasi untuk berinovasi , menciptakan daya tarik " PN Serui Top

BAB IV

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Serui memiliki indeks Persepsi Korupsi 3.58 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai

berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.79
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.96
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks :3,98
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 2, 47
5. Indikator Transaksi Biaya tambahan , mendapat indeks 2, 81.
6. Indikator Hadiah , mendapat indeks 3.83
7. Indikator Transparansi Biaya , mendapat indeks 3,03
8. Indikator Percaloan , mendapat indeks 3,94
9. Indikator Perbuatan curang , mendapat indeks 4.00
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.58

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui semester I (Periode Januari - Maret 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.58 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa ada 3 (dua)indikator transaksi biaya yaitu 2,47 biaya tambahan yaitu 2,81 dan transfransi biaya yaitu 3,03 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya .

9	Paulus Kadiwaru	Papua	45 thn	SMP/ WIRAUSA HA	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4	24-3-2022
10	Flora kandim	Papua	32 thn	SMU /WIRAUSA HA	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4	24-3-2022
11	Enjel Pipiana	Papua	46 thn	SMU /LAINNYA	4	4	4	1	1	4	1	4	4	1	24-3-2022
12	Suriyati	Papua	45 thn	SMU /WIRAUSA HA	4	4	4	2	1	4	1	4	4	4	24-3-2022

29	Daniel N Bonai	Papua	39 thn	SMU/PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22-3-202
30	Sepnat	Papua	39 thn	SMU /PNS	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	22-3-202
31	Y. Koressago	Papua	45 thn	SMU /LAINNYA	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	17-3-202
32	Nawaruddin	Papua	47 thn	SMU /WIRAUSAHA	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	17-3-202
33	Syarif	Papua	35 Thn	SMU /WIRAUSAHA	4	4	4	1	2	3	4	4	4	4	17-3-202

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

PENGADILAN NEGERI SERUI

MELALUI APLIKASI SISUPER PERIODE JANUARI -MARET 2022

NILAI IPK

89,58

RESPONDEN

Jumlah : 59 ORANG

Jenis kelamin: L=45 org/P = 14 org

Pendidikan : tidak/belum sekolah = 0

SD = 2 orang

SMP =9 orang

SMA = 33 Orang

D3 = 0 orang

S1 = 14 orang

S2 = 1 orang

S3 = 0 orang

**SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI(IPK) PENGADILAN
NEGERI SERUI MELALUI APLIKASI SISUPER**

PERIODE JANUARI - MARET 2022

NO	VARIABEL	NILAI	PERINGKAT
1	MANIPULASI PERATURAN	3,79 (Sangat Baik)	7
2	PENYALAGUNAAN JABATAN	3,96(Sangat Baik)	4
3	MENJUAL PENGARUH	3,98 (Sangat Baik)	3
4	TRANSAKSI BIAYA	2,47 (Kurang Baik)	10
5	BIAYA TAMBAHAN	2,81 (Kurang Baik)	9
6	HADIAH	3,83 (Sangat Baik)	6
7	TRANSPARANSI BIAYA	3,03 (Sangat Baik)	8
8	PERCALOAN	3,94(Sangat Baik)	5
9	PERBUATAN CURANG	4,00 (Sangat Baik)	1
10	TRANSAKSI RAHASIA	3,98 (Sangat Baik)	2

NILAI RATA-RATA VARIABEL : 3,58 (SANGAT BAIK)

IPK : 89,58

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA DAN PELAYANAN
1	1,00-2,5995	25,00- 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,5995- 3,064	64,99 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,064- 3,532	76,60- 88,30	B	BAIK
4	3,5324-4,00	88,30- 100	A	SANGAT BAIK